

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan dan kesehatan (modal manusia). Indonesia sendiri memiliki tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi, kesenjangan pendapatan yang buruk, dan tingkat kesejahteraan menurut wilayah juga belum merata. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan). Dibandingkan Saptember 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan, meskipun begitu perlu upaya-upaya secara serius dari pemerintah pusat untuk mengurangi penduduk miskin sehingga Indonesia bebas dari masalah kemiskinan. Tingkat kesejahteraan menurut wilayah tidak merata tercermin dari pola penurunan kemiskinan yang beragam. Ada wilayah yang berhasil menurunkan kemiskinan relatif lebih cepat, namun ada wilayah yang menurunkan wilayah kemiskinan lebih lambat.

Persoalan kemiskinan berkaitan dengan sifat dan pola pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah dapat optimal karena adanya perubahan organisasi sosial

dan sistem nilai (Rustiadi, et al., 2009). Adapun, produktivitas dan pengelolaan sumber daya dikondisikan oleh budaya dan modal sosial yang ada di masyarakat setempat (Hayami, 2009). Implementasi kebijakan pengurangan kemiskinan perlu membangun institusi-institusi sosial yang memungkinkan terbentuknya modal sosial yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan di perdesaan Indonesia (Rustiadi, et al., 2009; Fauzi 010; Slamet, 2010). Modal sosial telah terbukti berperan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia (Grootaert, 1999; Vipriyanti, 2007; Slamet, 2010; Nasution, et al., 2014a, 2014b).

Konsep modal sosial mengenai interaksi sosial antar individu menjadi topik utama dalam beberapa bidang penelitian. Meskipun masih dalam perdebatan, peran modal sosial untuk aspek sosial dan ekonomi bisa menjadi salah satu pembangunan inklusif. Interaksi sosial terjadi karena adanya saling membantu antar individu, antar komunitas, dan antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Meskipun konsep modal sosial dipahami secara berbeda, telah terjadi konvergensi menuju definisi yang berfokus pada jaringan norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang memfasilitasi kerjasama di antara kelompok-kelompok (Healy dan Hampshire 2002)

Definisi modal sosial berkisar jejaringan, norma, dan kepercayaan. Jejaringan adalah orang-orang yang saling mengenal sebagai keluarga, teman, dan tetangga pada komunitas atau kelompok (Putnam,1995), Norma adalah aturan yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang menggambarkan sebuah komunitas (Coleman 1988), kepercayaan adalah salah satu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu

yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung (Hasbullah, 2006).

Konsep modal sosial telah berkembang selama dua dekade terakhir dimulai ketika Coleman (1988) mengonseptualiskan modal sosial secara sistematis. Coleman memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Selanjutnya konsep modal sosial lebih diperjelas oleh Putnam (1993), yang menganalisis partisipasi masyarakat sosial yang mendorong pembangunan di Italia Utara.

Menurut para ahli, modal sosial merupakan modal sama halnya dengan pengetahuan yang bersifat *intangible*, yang akan berkembang dan lebih produktif apabila digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, modal sosial harus dijaga agar berkembang dan tetap produktif. Modal sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal fisik, dan modal lainnya untuk memfasilitasi aktivitas menjadi lebih produktif.

Modal sosial dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga melalui tiga jenis eksternalitas positif (Collier, 2002). Pertama, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang perilaku orang lain, mengurangi masalah oportunistik melalui interaksi yang berulang, dan membangun rasa saling percaya antar anggota. Kedua, modal sosial memfasilitasi transmisi pengetahuan tentang teknologi dan pasar, mengurangi kegagalan informasi (asimetri informasi). Transmisi pengetahuan dapat terjadi dengan mengumpulkan informasi dalam konteks jejaring sosial, baik interaksi

satu arah maupun interaksi timbal balik. Kedua eksternalitas ini dapat mengurangi oportunisme, yang dicapai melalui transaksi berulang dan reputasi. Ketiga, dengan mengandalkan norma dan aturan, modal sosial, mengurangi masalah penumpang gelap, sehingga memfasilitasi tindakan kolektif dalam mencapai tujuan bersama (mengurangi kemiskinan). Dengan demikian, efek eksternalitas ketiga ini adalah tindakan kolektif. Tindakan kolektif dicapai melalui norma-norma dan aturan yang disepakati dan berlaku bagi semua anggota kelompok. Modal sosial lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin untuk mensubstitusi modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik. Tentunya dengan adanya bantuan dari pemerintah akan sangat membantu kelancaran dari modal sosial tersebut, hubungan dengan institusi sosial dan modal sosial saling berkaitan.

Tingkat kemiskinan secara luas diakui sebagai indikator dari kesejahteraan rumah tangga. BPS (2013) mendefinisikan bahwa kemiskinan sebagai keadaan ketika seorang individu atau rumah tangga gagal mencapai tingkat kesejahteraannya tertentu. Kemiskinan sebagai ukuran kesejahteraan adalah permasalahan yang multikompleks yang melibatkan banyak faktor termasuk ekonomi lokal, modal sosial dan kelembagaan (Hayami, 2001; Indranto & Agustina, 2005; dan Rustiadi et al., 2009).

Indonesia sendiri pada Maret 2019 tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382 angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389 (BPS,2019). Kemiskinan dan ketimpangan juga dialami di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami fluktuasi

pada tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta hampir tersebar ke seluruh kabupaten/kota, hanya beberapa kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya rendah. Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan tingkat kemiskinan di DIY.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan DIY 2019

Kabupaten/Kota	Tingkat kemiskinan (%)
Bantul	12,92
Sleman	7,41
Gunung kidul	16,61
Kulon progo	17,39
Yogyakarta	6,84

Sumber: Bappeda Provinsi Yogyakarta, 2019

Bisa dilihat pada Tabel 1.1 ketimpangan di DIY cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari suatu pembangunan negara karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat, namun apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dengan cepat maka akan mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan karena pemerintah tidak memperhatikan besar atau kecilnya dari tingkat penduduk yang ada, maka dari itu modal sosial bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di DIY, karena modal sosial sendiri diyakini memiliki kedudukan setara dengan modal lainnya dalam pembangunan nasional. Bahkan modal sosial jarang dianggap sebagai perekat yang memungkinkan modal pembangunan lainnya dapat bekerja secara efektif

dan efisien untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan. Kondisi modal sosial sendiri di daerah pedesaan berbeda dengan modal sosial di daerah perkotaan. Perbedaan tersebut dicirikan dengan masyarakat pedesaan yang sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan berbeda dengan masyarakat perkotaan yang pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain (Soekanto, 2013). Hubungan kausal modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga belum banyak diteliti di pedesaan Indonesia (Nasution, Rustiadi, Juanda, Hadi, 2014: 137-148) , maka dengan begitu akan dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh modal sosial yang berjudul “Pengaruh Modal Sosial Dan Karakteristik Sosial Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Provinsi DIY”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga di Provinsi DIY?
- 2) Bagaimana pengaruh karakteristik sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga di Provinsi DIY
- 2) Untuk mengetahui pengaruh karakteristik sosial ekonomi rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga di Provinsi DIY

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang studi ekonomi pembangunan tentang modal sosial bagi kesejahteraan.
- 2) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberi gambaran dan informasi yang relevan bagi instansi yang terkait serta dapat menjadi bahan masukan untuk menyusun kebijakan yang lebih berpengaruh untuk daerah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini disajikan dalam sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan secara berurutan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan studi terkait mengenai dampak sosial bagi kesejahteraan rumah tangga.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional, model penelitian, dan uji-uji yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai hasil perhitungan dari analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran terhadap penelitian